

**EVALUASI IMPLEMENTASI SISTEM INFORMASI PEMERINTAH
DAERAH DALAM PENGELOLAAN KEUANGAN PADA PEMERINTAHAN
KABUPATEN KONAWE**



OLEH :

HANNA RACHEL FEBRIA

126231120

PROGRAM PENDIDIKAN PROFESI AKUNTAN

FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS

UNIVERSITAS TARUMANEGARA

JAKARTA

2024

LAPORAN TUGAS AKHIR
EVALUASI IMPLEMENTASI SISTEM INFORMASI PEMERINTAH
DAERAH DALAM PENGELOLAAN KEUANGAN PADA PEMERINTAHAN
KABUPATEN KONAWE



OLEH:
HANNA RACHEL FEBRIA
126231120

LAPORAN AKHIR DIAJUKAN SEBAGAI SALAH SATU SYARAT UNTUK
KELULUSAN PADA PROGRAM STUDI PENDIDIKAN PROFESI
AKUNTAN

PROGRAM PENDIDIKAN PROFESI AKUNTAN
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS TARUMANEGARA
JAKARTA

2024

**EVALUASI IMPLEMENTASI SISTEM INFORMASI PEMERINTAH
DAERAH DALAM PENGELOLAAN KEUANGAN PADA PEMERINTAHAN
KABUPATEN KONAWE**

Laporan Tugas Akhir

Disusun Oleh:



HANNA RACHEL FEBRIA

126231120

Disetujui Oleh:

Pembimbing



Dr. Henny Santoso, SE, M.Si, FMVA

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi implementasi penerapan SIPD (Sistem Informasi Pemerintah Daerah) dalam pengelolaan keuangan pada Pemerintah Kabupaten Konawe terkhusus dalam hal penyajian Laporan Keuangan Pemerintah Daerah. Penelitian ini menggunakan metode analisis deskriptif kualitatif, dengan menganalisis, menggambarkan, dan meringkas berbagai kondisi, situasi dari berbagai data yang dikumpulkan berupa hasil wawancara atau pengamatan mengenai masalah yang diteliti yang terjadi di lapangan. Hasil penelitian ini menunjukkan implementasi SIPD dalam pengelolaan keuangan pada Pemerintah Kabupaten Konawe sudah cukup optimal, akan tetapi perlu dilakukan pengendalian lebih terutama dalam penyajian laporan keuangan pada aplikasi SIPD. Hambatan yang ditemukan diantaranya kendala teknis seperti hanya Laporan Realisasi Anggaran (LRA) yang telah ter connect dengan SIPD sedangkan atas Laporan Neraca dan Laporan Operasional (LO) masih harus menggunakan kertas kerja manual, belum dapat digunakan untuk mengetahui realisasi anggaran riil, sistem sering mengalami update menu tampilan tanpa adanya pemberitahuan, serta jika mengalami kendala teknis atau error system Pemerintah Daerah Kabupaten Konawe mengalami kesulitan dalam menghubungi help desk pusat. Temuan dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan evaluasi dalam pengembangan kebijakan dan praktik terbaik dalam penerapan SIPD dalam pengelolaan keuangan pada Pemerintah Kabupaten Konawe.

Kata Kunci : *Implementasi SIPD, Pengelolaan Laporan Keuangan Daerah.*

ABSTRACT

This study aims to evaluate the implementation of the application of SIPD (Local Government Information System) in financial management at the Konawe Regency Government, especially in terms of presenting Local Government Financial Statements. This research uses a qualitative descriptive analysis method, by analyzing, describing, and summarizing various conditions, situations from various data collected in the form of the results of interviews or observations regarding the problems studied that occur in the field. The results of this study indicate that the implementation of SIPD in financial management at the Konawe Regency Government is quite optimal, but more control needs to be carried out, especially in the presentation of financial reports in the SIPD application. The obstacles found include technical obstacles such as only the Budget Realization Report (LRA) which has been connected to SIPD, while the Balance Sheet and Operational Report (LO) still have to use manual work papers, cannot be used to determine the real budget realization, the system often experiences display menu updates without notification, and if you experience technical problems or system errors, the Konawe Regency Regional Government has difficulty in contacting the central help desk. The findings of this study are expected to provide an evaluation in policy development and best practices in the application of SIPD in financial management at the Konawe Regency Government.

Keywords: *SIPD Implementation, Local Government Financial Statement*

KATA PENGANTAR

Puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa atas segala berkat yang telah diberikan-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan tugas akhir ini dengan baik. Tugas akhir ini disusun untuk memenuhi salah satu syarat kelulusan dari Program Studi Pendidikan Profesi Akuntan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Tarumanagara.

Dalam melaksanakan penulisan tugas akhir ini penulis telah banyak mendapat bimbingan, bantuan dan dukungan dari berbagai pihak, oleh karena itu dengan segalakerendahan hati penulis ingin mengucapkan terima kasih kepada:

1. Seluruh keluarga yang telah memberikan dukungan dan semangat selama proses perkuliahan hingga menyelesaikan penulisan tugas akhir ini.
2. Prof. Dr. Amad Sudiro, S.H., M.H., M.Kn., M.M. selaku Rektor Universitas Tarumanagara.
3. Dr. Sawidji Widoatmojo, S.E., M.M., MBA selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Tarumanagara.
4. Dr. Jamaludin Iskak, SE, MSi, Ak, CA, CPA, CPI, ASEAN CPA selaku Ketua Program Studi PPAk FEB Universitas Tarumanagara.
5. Dr. Henny Santoso, S.E., M.Si. selaku Dosen Pembimbing yang telah membantu serta telah meluangkan waktunya untuk membantu penulis dalam menyelesaikan tugas akhir ini.
6. Seluruh dosen, staf, dan karyawan di PPA FEB Universitas Tarumanagara yang telah membantu selama proses perkuliahan.
7. Teman-teman dan sahabat yang telah memberikan semangat dan dukungan dalam menyelesaikan penulisan tugas akhir ini.

Selain itu penulis berharap agar tugas akhir ini dapat bermanfaat bagi para pembaca dari berbagai kalangan. Penulis juga mengucapkan permohonan maaf jika selama proses penyusunan tugas akhir banyak melakukan kesalahan, baik lisan maupun tulisan, yang dilakukan secara disengaja maupun tidak disengaja.

Jakarta, Desember 2024

Hanna Rachel Febria

DAFTAR ISI

PENGESAHAN LAPORAN AKHIR	i
ABSTRAK	ii
KATA PENGANTAR	iv
DAFTAR ISI	v
DAFTAR TABEL	vii
DAFTAR GAMBAR	viii
BAB I	1
PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang Masalah.....	1
1.2. Identifikasi Masalah.....	4
1.3. Batasan Masalah	4
1.4. Perumusan Masalah	4
1.5. Tujuan dan Manfaat Penelitian	5
BAB II.....	6
LANDASAN TEORI.....	6
2.1. Kajian Pustaka.....	6
2.1.1. Teori Dasar	6
2.1.2. Teori Technology Acceptance Model (TAM)	7
2.1.3. Sistem Informasi Pemerintah Daerah.....	9
2.1.4. Pengelolaan Keuangan Daerah.....	12
2.1.5. Ruang Lingkup Pengelolaan Keuangan Daerah.....	14
2.2. Kerangka Berpikir Hipotesis Penelitian.....	14
2.3. Hipotesis Penelitian.....	15
BAB III	16
METODE PENELITIAN.....	16
3.1. Gambaran Umum Objek Penelitian	16
3.2. Metode Penelitian	16
3.3. Teknik Pengumpulan Data.....	17
3.4. Teknik Analisis Data.....	17

3.4.1. Reduksi Data	17
3.4.2. Penyajian Data.....	18
3.4.3. Penarikan Kesimpulan.....	18
BAB IV	19
HASIL DAN PEMBAHASAN.....	19
4.1. Profil Tempat Penelitian	19
4.1.1 Susunan Organisasi.....	19
4.1.2. Uraian Tugas Instansi	19
4.2. Gambaran Uraian Responden	21
4.3. Deskripsi Hasil Penelitian.....	24
4.3.1. Implementasi SIPD dalam Pengelolaan Keuangan pada Pemerintahan Kabupaten Konawe	24
4.3.2. Kendala Implementasi SIPD dalam Pengelolaan Keuangan pada Pemerintahan Kabupaten Konawe	28
4.3.3. Evaluasi Terhadap Implementasi SIPD dalam Pengelolaan Keuangan pada Pemerintahan Kabupaten Konawe	29
4.4. Upaya Implementasi SIPD dalam Pengelolaan Keuangan pada Pemerintahan Kabupaten Konawe	30
BAB V.....	32
KESIMPULAN DAN SARAN.....	32
5.1. Kesimpulan	32
5.2. Saran.....	33
DAFTAR PUSTAKA	34

DAFTAR TABEL

Tabel 4. 1. Daftar Kuesioner Penelitian	21
Tabel 4. 2. Kelompok Responden berdasarkan Profil Usia Responden.....	22
Tabel 4. 3. Kelompok Responden berdasarkan Jabatan Responden	22
Tabel 4. 4. Profil Responden berdasarkan Jenis Kelamin Responden	23
Tabel 4. 5. Profil Responden berdasarkan Masa Kerja Responden	23
Tabel 4. 6. Hasil Kuesioner Penelitian	24

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1. Kerangka Berpikir Hipotesis Penelitian.....	14
Gambar 4.1. Susunan Organisasi BPKAD Kabupaten Konawe	19

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah

Penerapan prinsip *good governance* sebagai wujud tugas penyelenggaraan pemerintah dalam meningkatkan kualitas kesejahteraan masyarakat dengan upaya menerapkan pengelolaan keuangan yang dapat mendukung segala fungsi agar lebih transparan, akuntabilitas dan berkelanjutan. Adanya tata kelola pelaksanaan pengelolaan keuangan di Indonesia, diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 12 Tahun 2019 tentang pengelolaan keuangan daerah dan kini telah disesuaikan dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 77 Tahun 2020 tentang teknis pengelolaan keuangan daerah. Dalam peraturan tersebut menjelaskan bahwa pemerintah daerah berwenang dalam mengelola pelaksanaan keuangannya, dimulai dari tahap perencanaan hingga akhirnya tahap pelaporan dan pertanggungjawaban serta pengawasan atas pelaksanaan pengelola keuangan yang dilakukan pemerintah daerah. Laporan keuangan dapat memenuhi fungsinya secara efektif jika memiliki karakteristik kualitatif tertentu, salah satunya adalah keandalan. Menurut Setijaningsih *et.al* (2021) dalam hal ini, keandalan informasi sangat tergantung pada kemampuan informasi untuk menggambarkan secara wajar situasi atau peristiwa dengan kondisi sebenarnya (bukan rekayasa).

Untuk menghasilkan laporan keuangan yang andal maka diperlukan kualitas sumber daya manusia yang baik dan teknologi informasi yang memadai. Kurangnya kualitas sumber daya manusia dan teknologi informasi dapat mempengaruhi keterandalan laporan keuangan pemerintah daerah. Selain kualitas sumber daya manusia yang baik dan juga teknologi yang memadai, menurut Indra *et.al* (2022), perlunya pengendalian internal yang efektif setidaknya harus memenuhi empat unsur-unsurnya, yaitu: (1) menjaga aset pemerintah daerah dari kemungkinan penyalahgunaan, (2) mendorong efisiensi dalam memenuhi peraturan daerah kebijakan manajemen pemerintah, (3) memastikan bahwa informasi akuntansi disajikan akurat dan (4) kepatuhan terhadap sistem dan prosedur atau peraturan yang berlaku.

Di era digital ini, tidak cukup eksplorasi melalui data manual yang sifatnya terbatas dan memerlukan waktu yang lama. Dibutuhkan tindakan yang cepat dan tepat, yaitu melalui sajian data elektronik, baik disajikan oleh pemerintah sendiri, swasta, investor, maupun temuan yang di kelola langsung secara profesional, sebagai pendukung penting dalam proses perencanaan dan pengelolaan (Sudianing dan Saputra, 2021). Permendagri Nomor 70 tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintah Daerah (SIPD) merupakan landasan implementatif pelaksanaan sinkronisasi perencanaan pembangunan dan penganggaran pembangunan daerah serta menjelaskan tentang pengelolaan informasi pembangunan daerah, informasi keuangan daerah, dan informasi pemerintahan daerah lainnya yang saling terhubung untuk dimanfaatkan dalam penyelenggaraan pembangunan daerah. Sehingga terbentuk suatu implementasi *web* yang dapat diterapkan dalam perencanaan pembangunan berbasis elektronik bernama Sistem Informasi Pemerintah Daerah (SIPD).

Sistem Informasi Pemerintah Daerah adalah suatu sistem yang mendokumentasikan, mengadministrasikan, serta mengolah data pembangunan daerah yang menjadi informasi yang disajikan kepada masyarakat dan sebagai bahan pengambilan keputusan dalam rangka perencanaan, pelaksanaan, evaluasi kinerja pemerintah daerah untuk mengoptimalkan pemanfaatan data dan informasi pembangunan daerah. Pengimplementasian Sistem Informasi Pemerintah Daerah bertujuan memudahkan pemerintah daerah dalam melakukan transparansi publik sehingga dapat meningkatkan kepercayaan dari masyarakat. Selain itu, berbagai instansi, baik pusat maupun daerah, baik kementerian maupun lembaga akan lebih mudah untuk mendapatkan data terkait kondisi keuangan atau data penyusunan anggaran daerah.

Sebagaimana penerapan Sistem Informasi Pemerintah Daerah (SIPD) dalam pengelolaan keuangan daerah di Pemerintah Kabupaten Konawe ditemukan berbagai fenomena berdasarkan tinjauan observasi awal penulis dari kantor pemerintahan Kabupaten Konawe yaitu: (1) penggunaan SIPD yang lebih rumit daripada SIMDA, (2) akses penggunaan SIPD yang mengharuskan menggunakan akun masing-masing sesuai bidang, (3) SIPD sering kali mengalami *error* dikarenakan server yang menginduk di pusat dan mengalami kelambatan dikarenakan penggunaan jaringan internet yang tidak stabil, (4) kurang responsifnya *help desk* SIPD sehingga jika terdapat permasalahan, perbaikan akan dilakukan di Kantor *Help desk* SIPD RI

Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia (Kemendagri) dan memakan waktu yang cukup lama, (5) tidak terdapat pemantauan atas realisasi anggaran riil sehingga tetap dapat dilakukan pengajuan realisasi anggaran belanja pada SIPD walau telah melebihi ketersediaan anggaran yang ditetapkan, (6) tidak dapat dilakukan edit transaksi jika terdapat kesalahan penginputan, sehingga dilakukan hapus transaksi dan menyebabkan nomor Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) lompat atau terlihat SP2D batal, (7) laporan keuangan daerah di Pemerintah Kabupaten Konawe secara Laporan Realisasi Anggaran (LRA) sudah ter *connect* dengan SIPD namun dalam pengimplementasiannya belum terpakai sepenuhnya, termasuk pada Laporan Neraca dan Laporan Operasional (LO) yang masih menerapkan kertas kerja manual, serta (8) Nomor Bagan Akun Standar (BAS) pada kertas kerja manual masih menggunakan BAS lama, sedangkan pada SIPD sudah menggunakan BAS terbaru sehingga perlu dilakukan pencocokan nilai akhir dikarenakan secara rincian masih terdapat perbedaan nomenklatur antara kertas kerja manual dengan SIPD.

SIPD dirancang dengan lebih adaptif, responsif, dinamis, inovatif dan akuntabel diharapkan mampu untuk membantu pemerintah daerah dalam pengelolaan laporan keuangan pemerintah daerah serta melakukan pengambilan keputusan yang efektif terkait kondisi keuangan pemerintah daerah. Karena apabila kondisi keuangan suatu organisasi dikatakan tidak sehat, maka keputusan-keputusan yang akan dikeluarkan oleh organisasi akan sangat terbatas melihat dengan terbatasnya aktiva yang dimiliki saat ini (Rezkianty *et.al*, 2024). Menurut Muhammad Irfan (2021), perlunya peningkatan dalam kegiatan bimbingan teknis bagi setiap satuan kerja perangkat daerah yang menggunakan sistem informasi pemerintah daerah, dan diberikan sumber daya lebih bagi satuan kerja perangkat daerah (SKPD) dalam menangani sistem informasi pemerintah daerah (SIPD).

Berdasarkan latar belakang masalah yang sudah di uraikan di atas, penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **“Implementasi SIPD (Sistem Informasi Pemerintah Daerah) dalam Pengelolaan Keuangan Daerah pada Pemerintahan Kabupaten Konawe”**.

1.2. Identifikasi Masalah

Berdasarkan hasil observasi awal pada Pemerintahan Daerah Kabupaten Konawe, diketahui terdapat beberapa permasalahan seperti penggunaan SIPD yang lebih rumit daripada SIMDA, akses penggunaan SIPD yang mengharuskan menggunakan akun masing-masing sesuai bidang, SIPD sering kali mengalami *error*, kurang responsifnya *help desk* SIPD, tidak terdapat pemantauan atas anggaran belanja yang telah direalisasikan, tidak dapat dilakukan edit transaksi jika terdapat kesalahan penginputan, laporan keuangan daerah di Pemerintah Daerah Kabupaten Konawe yang masih menerapkan kertas kerja manual, serta Nomor BAS pada kertas kerja manual masih menggunakan BAS lama yang dapat menghambat efektivitas penggunaan sistem informasi pemerintah daerah. Kurang efektifnya penggunaan sistem informasi pemerintah daerah pada Pemerintahan Daerah Kabupaten Konawe serta permasalahan yang ditemukan dalam penggunaan SIPD menjadi pokok permasalahan dalam penelitian ini.

1.3. Batasan Masalah

Batasan masalah pada penelitian ini dilakukan untuk menghindari adanya suatu penyimpangan maupun pelebaran pokok masalah sehingga dapat lebih fokus terhadap permasalahan secara mendalam. Maka peneliti membatasi ruang lingkup yang difokuskan pada Implementasi Sistem Informasi Pemerintah Daerah yang dikaitkan dengan Pengelolaan Keuangan Daerah.

1.4. Perumusan Masalah

Berdasarkan pemaparan yang telah dijelaskan, maka timbul beberapa pertanyaan dalam penelitian ini yang diuraikan sebagai berikut:

1. Bagaimana implementasi sistem informasi pemerintah daerah dalam pengelolaan keuangan pada Pemerintahan Kabupaten Konawe?
2. Bagaimana kendala implementasi sistem informasi pemerintah daerah dalam pengelolaan keuangan pada Pemerintahan Kabupaten Konawe?
3. Bagaimana evaluasi terhadap implelementasi sistem informasi pemerintah daerah dalam pengelolaan keuangan pada Pemerintahan Kabupaten Konawe?

1.5. Tujuan dan Manfaat Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah dijabarkan, maka adapun tujuan penulis melakukan penelitian :

1. Untuk mengetahui implementasi sistem informasi pemerintah daerah dalam pengelolaan keuangan pada Pemerintahan Kabupaten Konawe.
2. Untuk mengetahui kendala implelementasi sistem informasi pemerintah daerah dalam pengelolaan keuangan pada Pemerintahan Kabupaten Konawe.
3. Untuk mengetahui evaluasi terhadap implelementasi sistem informasi pemerintah daerah dalam pengelolaan keuangan pada Pemerintahan Kabupaten Konawe.

Berdasarkan tujuan penelitian yang ingin dicapai, maka diharapkan penelitian ini memiliki manfaat penelitian :

1. Manfaat Praktis

Penelitian ini diharapkan menjadi referensi bagi Pemerintah Daerah Kabupaten Konawe terkait dalam mengimplempentasian penggunaan sistem informasi pemerintah daerah. Terutama berkaitan dengan pengelolaan keuangan daerah.

2. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan mampu memberi wawasan dan pengetahuan, serta menjadi literatur review bagi penelitian selanjutnya terkait implementasi sistem informasi pemerintah daerah. Terutama yang berkaitan dengan pengelolaan keuangan daerah.

DAFTAR PUSTAKA

- Ditjen Bina Bangsa Kemendagri. (n.d.).* (2021). Diambil kembali dari Semakin Kesini SIPD Semakin Jelas: https://bangda.kemendagri.go.id/berita/baca_kontent/30/semakin_ke_sini_sipd_semakin_jelas
- Amri, Z. F. (2022). IMPLEMENTASI SISTEM INFORMASI PEMERINTAH DAERAH (SIPD) DALAM RANGKA MENINGKATKAN KUALITAS LAPORAN KEUANGAN DI KECAMATAN (Studi kasus di Kantor Kecamatan Semarang Timur) . 20.
- Andi Hunairah Rezkiaty, S. A. (2024). Evaluasi Implementasi Sistem Informasi Pemerintah Daerah (SIPD) dalam Pengelolaan Keuangan Daerah Pada Badan Keuangan Aset Daerah Pemerintah Kabupaten Bulukumba . *SEIKO : Journal of Management & Business*, Pages 464 - 478 .
- ANDRIAWAN, I. R. (2020). Earning Management Actions and Conditional Revenue as . *THE INDONESIAN JOURNAL OF ACCOUNTING RESEARCH*, 349-372.
- Asdar, L. d. (2022). *Manajemen Pemasaran Digital Kunci Sukses Masa Depan*. Pekalongan: PT. Nasya Expanding Management.
- Blongkod, H. (2023). *PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH DAN SISTEM PENGENDALIAN INTERN*. Sukoharjo: Tahta Media Group.
- Darma Krisnanto, N. A. (2024). Analisis Kompetensi Aparatur Terhadap Sistem Pengelolaan Keuangan Daerah di Desa Trimurjo. *Jurnal Akuntan Publik* Vol.2, No.2 Juni 2024, 149-150.
- Ditjen Bina Bangsa Kemendagri. (n.d.).* (2021). Diambil kembali dari Kemendagri Luncurkan Sistem Informasi: https://bangda.kemendagri.go.id/berita/baca_kontent/1331/pasca_sipd_ri_diluncurkan_sebagai_aplikasi_umum_pemda_ditjen_bangda_gelar_sosialisasi_e-walidata
- Dr. H. Mukhtar Mas'ud, M. S. (2022). *IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PEMERINTAH*. Jakarta: Citra Multi Persada (CMP).

- Herlin Tundjung Setijaningsih, S. E. (2021). Factors Affecting The Selection of Fair Value Methods for Investment Property. *Jurnal Organisasi dan Manajemen* , 111-121.
- Indra, J. I. (2022). Enhancing the Role of the Audit Board of the Republic of Indonesia in Fraud Detection. *Jurnal Tata Kelola dan Akuntabilitas Keuangan Negara, Volume 8, Number 2*, 131-143.
- Joko Pramono. S. Sos., M. (2020). *IMPLEMENTASI DAN EVALUASI KEBIJAKAN PUBLIK*. Surakarta: UNISRI Press.
- Nadia Yusni Mardiana, N. A. (2022). Persepsi Kegunaan Dan Kemudahan Teknologi Internet Terhadap Efektifitas Perusahaan Di JABODETABEK . *Ekonomika* 6 , 1-10.
- Pahri Fahlevi, A. O. (2019). ANALISIS APLIKASI iJATENG DENGAN MENGGUNAKAN TEORI TECHNOLOGY ACCEPTANCE MODEL (TAM. *Jurnal Imu Perpustakaan Vol. 8 No.2*, 103-110.
- Pasaribu, D. (t.thn.). Kajian Kritis Terhadap Factor-Faktor Yang Mempengaruhi Preferensi Mahasiswa Dalam Memilih Pembayaran ElektronikNon Bank . 20.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah.* (t.thn.).
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 77 Tahun 2020 tentang teknis pengelolaan keuangan daerah.* (t.thn.).
- Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan.* (t.thn.).
- SETIADI, A. R. (2022). *ANALISIS IMPLEMENTASI SISTEM INFORMASI PEMERINTAHAN DAERAH (SIPD) PERENCANAAN ANGGARAN DAERAH PADA PEMERINTAH KOTA BANDUNG (Lokus Penelitian Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Bandung)*. Bandung: TESIS PROGRAM STUDI MAGISTER AKUNTANSI SEKOLAH PASCASARJANA WIDYATAMA.
- Sugiyono. (2011). *Memahami Penelitian Kualitatif*. Bandung: Alfabeta.

- Sugiyono. (2019). *Metodelogi Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif Dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Sugiyono. (2020). *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: Alfabeta.
- Tumija1, A. H. (2023). Penerapan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD)dalam Pengelolaan Keuangan Daerah pada Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kota Semarang Provinsi Jawa Tengah. *Jurnal Media Birokasi, Volume 5, Nomor 1*, 79-91.